

Penguatan Budaya Mutu dalam Menghadapi Akreditasi: Refleksi Penjaminan Mutu di SMK Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta

¹Muhammad Mustakfibillah

¹Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia

Email: 251500066@almata.ac.id

Abstrak

Penguatan mutu pendidikan kejuruan tidak cukup dilakukan melalui pemenuhan dokumen akreditasi, tetapi membutuhkan budaya organisasi yang menempatkan perbaikan berkelanjutan sebagai bagian dari praktik pendidikan. Artikel ini bertujuan menganalisis penguatan budaya mutu dalam menghadapi akreditasi di SMK Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta melalui perspektif *Total Quality Management* (TQM), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), pendidikan vokasional, dan nilai kepesantrenan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-reflektif dengan metode studi dokumentasi. Data diperoleh dari dokumen resmi satuan pendidikan, regulasi dan panduan akreditasi, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan melalui identifikasi karakteristik kelembagaan, pemetaan konsep mutu, interpretasi keterkaitan teori dengan konteks pendidikan vokasional dan pesantren, serta penyusunan refleksi dan rekomendasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa budaya mutu perlu dibangun melalui keterpaduan kualitas pembelajaran, kompetensi kejuruan, karakter, relevansi lulusan, kepemimpinan, keterlibatan warga sekolah, pengambilan keputusan berbasis data, dan dokumentasi berbasis bukti. Akreditasi perlu diposisikan sebagai instrumen evaluasi dan refleksi, bukan tujuan administratif. Nilai kepesantrenan dapat menjadi modal budaya untuk memperkuat integritas, disiplin, tanggung jawab, dan etika kerja. Kajian merekomendasikan penerapan siklus mutu tahunan, evaluasi diri berkala, indikator mutu khas sekolah, dokumentasi berkelanjutan, penguatan *teamwork*, dan pemanfaatan hasil akreditasi sebagai *baseline* pengembangan mutu.

Kata Kunci: Budaya Mutu; Akreditasi; TQM; Pendidikan Vokasional; Pesantren.

Abstract

Strengthening the quality of vocational education cannot rely solely on fulfilling accreditation documents but requires an organizational culture that places continuous improvement at the center of educational practice. This article aims to analyze quality culture strengthening in preparation for accreditation at SMK Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta through the perspectives of Total Quality Management (TQM), Internal Quality Assurance System (SPMI), vocational education, and pesantren values. The study employs a qualitative-reflective approach using a documentary study method. Data were obtained from official institutional documents, accreditation regulations and guidelines, and relevant scientific literature. The analysis involved identifying institutional characteristics, mapping quality-related concepts, interpreting their relevance to vocational and pesantren education, and formulating critical reflections and practical recommendations. The findings indicate that quality culture needs to integrate learning quality, vocational competence, character development, graduate relevance, leadership, stakeholder involvement, data-driven decision-making, and evidence-based documentation. Accreditation should function as an instrument for evaluation and reflection rather than merely an administrative target. Pesantren values can serve as cultural capital for strengthening integrity, discipline, responsibility, and work ethics. The study recommends an annual quality cycle, periodic self-evaluation, school-specific quality indicators, continuous documentation, strengthened teamwork, and the use of accreditation results as a baseline for subsequent quality improvement.

Keywords: Quality Culture; Accreditation; TQM; Vocational Education; Pesantren.

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan merupakan fondasi utama dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan satuan pendidikan. Mutu tidak lagi memadai apabila hanya dipahami melalui capaian akademik peserta didik atau pemenuhan indikator administratif. Mutu pendidikan mencakup keterpaduan antara kualitas proses pembelajaran, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, kepemimpinan, pengelolaan kelembagaan, sarana dan prasarana, layanan pendidikan, relevansi lulusan, serta kemampuan sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Perspektif tersebut menempatkan mutu sebagai proses organisasional yang berlangsung secara terus-menerus. Sekolah dituntut tidak hanya mencapai standar pada waktu tertentu, tetapi mampu membangun sistem yang menjadikan evaluasi, refleksi, dan perbaikan sebagai bagian dari kebiasaan kerja sehari-hari. Dalam konteks tersebut, penjaminan mutu pendidikan perlu diarahkan dari sekadar kepatuhan terhadap standar menuju pembentukan budaya mutu yang hidup dalam seluruh aktivitas organisasi.

Salah satu kerangka yang relevan untuk membangun budaya tersebut adalah Total Quality Management (TQM). TQM menempatkan mutu sebagai tanggung jawab seluruh anggota organisasi melalui orientasi pada pengguna layanan, kerja sama, komitmen jangka panjang, pemberdayaan sumber daya manusia, pengambilan keputusan berbasis data, serta perbaikan berkelanjutan (Hasnadi, 2021). Perspektif ini penting karena persoalan mutu tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan kepala sekolah, pembentukan tim penjaminan mutu, atau penambahan dokumen administrasi. Mutu membutuhkan keterlibatan kolektif dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dunia kerja, dan pemangku kepentingan lainnya. Yasin (2021) menegaskan bahwa persoalan peningkatan mutu pendidikan juga memiliki dimensi kultural. Sikap mental, sistem nilai, kebiasaan kerja, dan budaya organisasi dapat menjadi faktor yang memperkuat ataupun menghambat peningkatan mutu. Dengan demikian, penguatan mutu pendidikan pada dasarnya merupakan proses transformasi

organisasi yang menghubungkan sistem, manusia, nilai, dan kebiasaan kerja dalam satu orientasi perbaikan yang berkelanjutan.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berbeda dengan pendidikan umum, mutu SMK memiliki dimensi vokasional yang secara langsung berkaitan dengan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Kualitas sekolah tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pembelajaran di kelas, tetapi juga oleh ketercapaian kompetensi keahlian, relevansi kurikulum, kualitas praktik, keterhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri, pengalaman kerja lapangan, serta kemampuan lulusan memenuhi tuntutan pekerjaan. Nurryna, Widiastuti, dan Saputro (2024) melalui *systematic literature review* menunjukkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada SMK memiliki posisi strategis dalam memastikan kompetensi lulusan memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sekaligus merespons kebutuhan industri. Namun, implementasi SPMI pada sejumlah SMK masih menghadapi persoalan karena belum dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem penjaminan mutu belum secara otomatis menghasilkan budaya mutu. Efektivitasnya sangat bergantung pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan kemampuan sekolah mengintegrasikan penjaminan mutu ke dalam praktik pengelolaan pendidikan sehari-hari (Nurryna et al., 2024).

Dalam kerangka tersebut, akreditasi memiliki posisi strategis sebagai instrumen evaluasi eksternal sekaligus momentum bagi sekolah untuk melakukan refleksi terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan. Akreditasi seharusnya tidak ditempatkan sebagai kegiatan temporer yang hanya menjadi perhatian ketika sekolah akan menghadapi visitasi. Orientasi semacam itu berisiko menghasilkan *accreditation compliance*, yaitu kecenderungan sekolah mempersiapkan dokumen dan eviden hanya untuk memenuhi tuntutan penilaian. Sebaliknya, akreditasi perlu diposisikan sebagai bagian dari siklus peningkatan mutu yang menghubungkan evaluasi eksternal dengan

penjaminan mutu internal. Panduan Akreditasi BAN-PDM 2025 untuk sekolah dan madrasah, termasuk SMK/MAK, menempatkan proses akreditasi tidak hanya pada instrumen dan prosedur penilaian, tetapi juga pada pemanfaatan hasil akreditasi untuk membantu satuan pendidikan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Orientasi tersebut semakin memperoleh legitimasi melalui kebijakan nasional terbaru. Permendikdasmen Nomor 14 Tahun 2026 tentang Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan (BSANP) mengatur akreditasi yang berbasis mutu, objektif, transparan, dan akuntabel serta memasukkan tindak lanjut hasil akreditasi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Regulasi tersebut sekaligus mencabut Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2023. Perubahan kebijakan ini menunjukkan bahwa akreditasi semakin diarahkan untuk menjadi bagian dari tata kelola mutu yang berkelanjutan, bukan sekadar mekanisme pemberian status atau peringkat satuan pendidikan.

Hubungan antara akreditasi dan budaya mutu dengan demikian perlu dilihat secara lebih kritis. Akreditasi dapat memberikan dorongan terhadap peningkatan mutu apabila hasil evaluasi eksternal diterjemahkan menjadi dasar pengambilan keputusan, perencanaan program, pengembangan kompetensi guru, pembenahan layanan, penguatan sarana prasarana, serta evaluasi berkelanjutan. Sebaliknya, apabila akreditasi hanya dipahami sebagai target administratif, proses tersebut berpotensi menghasilkan peningkatan yang bersifat temporer dan tidak membentuk perubahan perilaku organisasi. Dalam perspektif TQM, keberhasilan peningkatan mutu justru ditentukan oleh kemampuan organisasi mengubah hasil evaluasi menjadi tindakan perbaikan yang berulang dan terukur. Oleh karena itu, persoalan utama dalam menghadapi akreditasi bukan sekadar bagaimana sekolah memperoleh predikat tertentu, tetapi bagaimana proses akreditasi dapat membangun kebiasaan organisasi untuk mengevaluasi, belajar, memperbaiki, dan mempertahankan mutu.

Perspektif tersebut menjadi penting ketika diterapkan pada lembaga pendidikan kejuruan yang berada dalam lingkungan pesantren. Integrasi pendidikan vokasional dan kepesantrenan menghadirkan karakteristik organisasi yang berbeda dibandingkan sekolah kejuruan pada umumnya. Pendidikan tidak hanya diarahkan pada penguasaan kompetensi teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan etos kerja. Nilai amanah, kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, kemandirian, dan etika dapat menjadi modal kultural dalam membangun perilaku mutu. Dengan demikian, budaya mutu pada sekolah berbasis pesantren memiliki kemungkinan untuk dibangun melalui pertemuan antara standar profesional pendidikan vokasional dan nilai-nilai moral kepesantrenan. Integrasi tersebut menjadi penting karena kualitas lulusan SMK idealnya tidak berhenti pada kemampuan teknis, tetapi juga tercermin dalam sikap profesional, tanggung jawab, integritas, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja.

Konteks tersebut relevan untuk dikaji pada SMK Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Berdasarkan data resmi Direktorat SMK, sekolah tersebut merupakan satuan pendidikan SMK swasta dengan NPSN 20409902 yang beralamat di Jalan KH. Ali Maksum Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data resmi pemerintah mencatat SMK Al-Munawwir Krapyak memiliki status akreditasi B, dengan SK Akreditasi Nomor 104/BAN-PDM/SK/2024 yang ditetapkan pada 22 Juli 2024. Posisi tersebut menjadikan sekolah menarik untuk dikaji karena akreditasi dapat dipandang bukan sebagai hasil akhir, melainkan sebagai titik evaluasi untuk mengidentifikasi ruang penguatan mutu berikutnya. Pada saat yang sama, keberadaan sekolah dalam lingkungan Yayasan Al-Munawwir Krapyak memberikan konteks kepesantrenan yang memungkinkan nilai-nilai pendidikan Islam berinteraksi dengan tuntutan pendidikan kejuruan.

Kajian mengenai budaya mutu pada SMK Al-Munawwir Krapyak menjadi penting karena terdapat ruang penelitian yang belum banyak dieksplorasi. Studi mengenai TQM telah menjelaskan pentingnya keterlibatan

seluruh warga sekolah dan perbaikan berkelanjutan (Hasnadi, 2021), sedangkan kajian tentang dimensi kultural menunjukkan bahwa perubahan mutu membutuhkan transformasi sikap, nilai, dan kebiasaan organisasi (Yasin, 2021). Penelitian Nurryna et al. (2024) juga memperlihatkan bahwa SPMI pada SMK masih menghadapi persoalan integrasi dan keberlanjutan. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan budaya mutu, TQM, SPMI, akreditasi, karakter pendidikan vokasional, dan nilai kepesantrenan dalam satu kerangka analisis pada sekolah kejuruan berbasis pesantren masih relatif terbatas. Celah inilah yang menjadi ruang penting bagi penelitian untuk melihat bagaimana akreditasi dapat ditransformasikan dari agenda pemenuhan administratif menjadi instrumen pembentukan budaya mutu.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan budaya mutu dalam menghadapi akreditasi di SMK Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Analisis diarahkan pada bagaimana prinsip TQM dan penjaminan mutu internal diintegrasikan dengan proses akreditasi, bagaimana keterlibatan warga sekolah membentuk budaya perbaikan berkelanjutan, serta bagaimana karakter pendidikan vokasional dan nilai kepesantrenan dapat menjadi modal dalam membangun mutu lembaga. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis bahwa keberhasilan akreditasi tidak semestinya diukur hanya dari capaian peringkat, tetapi dari kemampuan sekolah menjadikan hasil evaluasi sebagai budaya kerja yang mendorong pembelajaran organisasi, perbaikan berkelanjutan, dan peningkatan kualitas lulusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-reflektif dengan metode studi dokumentasi untuk menganalisis penguatan budaya mutu dalam konteks akreditasi pada pendidikan kejuruan berbasis pesantren. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi langsung terhadap kepala sekolah, guru, peserta didik, maupun tenaga kependidikan di SMK Al-Munawwir Krapyak

Yogyakarta. Data penelitian bersumber dari dokumen publik dan sumber sekunder yang relevan, meliputi profil dan data kelembagaan SMK Al-Munawwir Krapyak yang tersedia pada basis data resmi pemerintah, dokumen kebijakan pendidikan dan akreditasi, serta artikel ilmiah yang membahas *Total Quality Management* (TQM), budaya mutu, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), akreditasi, dan pendidikan kejuruan. Studi dokumentasi memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman kontekstual melalui penelaahan dokumen secara sistematis tanpa membuat klaim mengenai kondisi internal sekolah yang tidak dapat diverifikasi melalui sumber publik. Penggunaan pendekatan berbasis dokumen juga relevan dengan kajian mutu pendidikan sebelumnya yang memanfaatkan *literature review* untuk menganalisis TQM (Hasnadi, 2021), kajian mengenai dimensi kultural dalam peningkatan mutu pendidikan (Yasin, 2021), serta *systematic literature review* mengenai implementasi SPMI pada SMK (Nurryna et al., 2024).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif dan reflektif melalui empat tahapan, yaitu identifikasi karakteristik kelembagaan SMK Al-Munawwir Krapyak berdasarkan sumber resmi, pemetaan konsep budaya mutu, TQM, SPMI, dan akreditasi berdasarkan literatur serta kebijakan, interpretasi hubungan antarkonsep dalam konteks pendidikan kejuruan dan lingkungan pesantren, serta penyusunan refleksi kritis dan rekomendasi penguatan budaya mutu yang bersifat aplikatif. Analisis diarahkan untuk menemukan keterkaitan antara tuntutan akreditasi, mekanisme penjaminan mutu internal, prinsip perbaikan berkelanjutan, dan nilai-nilai yang relevan dengan pendidikan berbasis pesantren. Kerangka analisis tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan akreditasi yang menempatkan evaluasi mutu dan tindak lanjut sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan (BAN-PDM, 2025; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026). Karena penelitian tidak menggunakan data primer lapangan, artikel ini tidak dimaksudkan untuk memverifikasi praktik internal

sekolah secara empiris. Istilah “praktik baik” digunakan dalam arti praktik yang direkomendasikan atau berpotensi dikembangkan berdasarkan sintesis teori, hasil penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, dan karakteristik pendidikan kejuruan. Batasan tersebut menjadi bagian penting dari kehati-hatian interpretatif agar rekomendasi yang dihasilkan tetap proporsional dengan jenis dan sumber data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Mutu sebagai Fondasi Penguatan Sekolah

Budaya mutu merupakan seperangkat nilai, keyakinan, kebiasaan, pola pikir, dan perilaku bersama yang mengarahkan seluruh anggota organisasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Konsep ini menunjukkan bahwa budaya mutu memiliki dimensi yang lebih mendalam daripada sekadar keberadaan dokumen, standar, atau prosedur mutu. Dokumen menentukan apa yang seharusnya dilakukan, sedangkan budaya mutu menentukan bagaimana dan sejauh mana ketentuan tersebut menjadi bagian dari kebiasaan kerja organisasi. Dalam perspektif Total Quality Management (TQM), mutu bukan merupakan tanggung jawab individu atau unit tertentu, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh anggota organisasi yang dibangun melalui komitmen jangka panjang, kerja sama tim, pemberdayaan sumber daya manusia, dan continuous improvement (Hasnadi, 2021). Perspektif ini diperkuat oleh Yasin (2021) yang menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan memiliki persoalan kultural karena sikap mental, sistem nilai, dan kebiasaan para pelaku pendidikan dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat perubahan mutu. Dengan demikian, sekolah yang memiliki banyak dokumen mutu belum tentu memiliki budaya mutu apabila dokumen tersebut hanya diproduksi untuk kepentingan administratif dan tidak memengaruhi perilaku organisasi.

Secara teoritis, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui perbedaan antara quality culture sebagai nilai dan keyakinan bersama dengan quality work culture sebagai manifestasi nilai tersebut dalam perilaku kerja. Budaya

mutu baru dapat dikatakan kuat ketika nilai kualitas tercermin dalam cara guru merencanakan pembelajaran, cara pimpinan mengambil keputusan, cara sekolah menggunakan data evaluasi, cara tenaga kependidikan memberikan layanan, serta kesediaan seluruh warga sekolah melakukan koreksi terhadap kelemahan yang ditemukan. Dalam kerangka continuous improvement, evaluasi tidak dipandang sebagai kegiatan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai sumber pembelajaran organisasi untuk menentukan tindakan perbaikan berikutnya. Perspektif tersebut relevan bagi SMK Al-Munawwir Krapyak karena penguatan mutu idealnya tidak diarahkan semata-mata pada kesiapan menghadapi akreditasi, tetapi pada pembentukan kebiasaan organisasi yang menjadikan mutu sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari. Pertanyaan strategisnya bukan hanya apakah sekolah telah memiliki sistem mutu, melainkan apakah sistem tersebut telah membentuk perilaku mutu yang berlangsung secara konsisten. Dengan demikian, budaya mutu dapat menjadi fondasi yang menghubungkan kebijakan, sistem penjaminan mutu, perilaku warga sekolah, dan hasil pendidikan dalam satu siklus perbaikan berkelanjutan.

Akreditasi: Tujuan Akhir atau Instrumen Perbaikan Mutu?

Akreditasi seharusnya tidak ditempatkan sebagai tujuan akhir penyelenggaraan pendidikan karena status atau peringkat akreditasi pada dasarnya merupakan representasi hasil evaluasi terhadap kualitas satuan pendidikan pada periode tertentu. Apabila akreditasi diperlakukan sebagai tujuan akhir, terdapat risiko munculnya orientasi compliance, yaitu sekolah lebih berfokus pada pemenuhan dokumen, eviden, dan indikator penilaian menjelang visitasi daripada memperbaiki kualitas proses pendidikan secara konsisten. Sebaliknya, dalam perspektif TQM, evaluasi eksternal akan memiliki nilai strategis apabila hasilnya digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan, menetapkan prioritas perbaikan, melaksanakan tindakan korektif, dan mengevaluasi kembali hasil perbaikan tersebut. Prinsip ini sejalan dengan siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA), yaitu

mutu dikembangkan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan perbaikan yang dilakukan secara berulang. Dengan kerangka tersebut, akreditasi tidak berhenti pada pertanyaan tentang “berapa nilai yang diperoleh sekolah?”, tetapi bergerak menuju pertanyaan yang lebih substantif: “apa yang dapat dipelajari sekolah dari proses evaluasi tersebut dan bagaimana hasilnya diterjemahkan menjadi perbaikan?”

Paradigma tersebut semakin relevan dengan arah kebijakan akreditasi nasional. Permendikdasmen Nomor 14 Tahun 2026 menempatkan akreditasi dalam kerangka pengembangan standar dan penjaminan mutu pendidikan yang berkelanjutan dengan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel. Panduan Akreditasi BAN-PDM 2025 juga menempatkan hasil akreditasi sebagai bagian yang dapat dimanfaatkan satuan pendidikan untuk melakukan peningkatan mutu. Dengan demikian, akreditasi idealnya membentuk hubungan yang saling memperkuat dengan SPMI. SPMI menghasilkan evaluasi dan perbaikan dari dalam, sedangkan akreditasi memberikan perspektif evaluatif dari luar. Apabila keduanya terintegrasi, sekolah tidak perlu membangun sistem mutu hanya ketika menghadapi visitasi karena evaluasi internal telah berlangsung sebagai rutinitas organisasi. Dalam konteks ini, akreditasi dapat dipahami sebagai feedback mechanism yang membantu sekolah melihat kualitasnya secara lebih objektif. Perubahan paradigma tersebut menggeser orientasi dari “bagaimana memperoleh predikat akreditasi yang baik?” menjadi “bagaimana membangun kualitas pendidikan yang baik sehingga predikat akreditasi merupakan konsekuensi dari mutu yang benar-benar berlangsung?” Pergeseran inilah yang menjadi salah satu indikator penting terbentuknya budaya mutu yang matang.

Posisi SMK Al-Munawwir sebagai Konteks Penguatan Mutu

SMK Al-Munawwir Krapyak secara resmi tercatat sebagai satuan pendidikan SMK swasta dengan NPSN 20409902 dan status akreditasi B. Informasi tersebut memberikan konteks kelembagaan yang penting dalam melihat penguatan mutu, tetapi tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan

kondisi internal sekolah secara langsung karena artikel ini menggunakan studi dokumentasi. Status akreditasi B lebih tepat ditempatkan sebagai baseline evaluatif, bukan sebagai batas akhir pencapaian mutu. Dalam perspektif continuous improvement, tidak ada hasil evaluasi yang seharusnya diperlakukan sebagai titik berhenti. Setiap hasil evaluasi perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan mengenai aspek yang harus dipertahankan, aspek yang perlu diperbaiki, dan aspek yang perlu dikembangkan. Dengan demikian, makna strategis akreditasi bukan hanya terletak pada predikat yang diperoleh, tetapi pada kemampuan sekolah memanfaatkan hasil evaluasi untuk menentukan prioritas pengembangan berikutnya.

Perspektif tersebut sejalan dengan kajian mengenai SPMI pada SMK yang menunjukkan bahwa efektivitas penjaminan mutu membutuhkan keterlibatan berbagai unsur sekolah sejak tahap perencanaan hingga evaluasi (Nurryna et al., 2024). Dalam kerangka TQM, keterlibatan tersebut penting karena mutu tidak dapat dibangun melalui kerja satu tim secara terpisah, tetapi melalui koordinasi seluruh unsur organisasi. Bagi SMK Al-Munawwir, konteks pendidikan kejuruan juga menuntut agar budaya mutu tidak hanya diarahkan pada pemenuhan standar administratif, tetapi dikaitkan dengan kualitas pembelajaran vokasional, kompetensi lulusan, relevansi dengan kebutuhan dunia kerja, serta pembentukan karakter. Lingkungan kepesantrenan dapat menjadi modal kultural yang memperkuat proses tersebut melalui nilai amanah, disiplin, tanggung jawab, integritas, dan etika kerja. Oleh karena itu, penguatan budaya mutu dapat diarahkan pada integrasi sistem mutu, kompetensi vokasional, evaluasi berkelanjutan, dan nilai kepesantrenan. Posisi akreditasi B kemudian dapat dipahami bukan sebagai label yang harus dipertahankan semata, tetapi sebagai titik refleksi untuk membangun sistem pendidikan yang semakin adaptif, konsisten, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Pendidikan Vokasional, Tantangan Budaya Mutu dan Kepemimpinan dan Keterlibatan Warga Sekolah

Budaya mutu pada SMK memiliki karakter yang lebih kompleks karena kualitas pendidikan tidak hanya diukur melalui capaian akademik, tetapi juga kompetensi kejuruan, karakter, serta relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Nurryna et al. (2024) menunjukkan bahwa SPMI pada SMK berperan penting dalam memastikan kompetensi lulusan memenuhi standar nasional sekaligus kebutuhan industri, meskipun implementasinya pada beberapa SMK masih belum terpadu dan berkelanjutan. Sejalan dengan TQM, Lasiana dan Hidayatulloh (2022) menunjukkan bahwa pendekatan mutu dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara sistematis. Karena itu, budaya mutu SMK Al-Munawwir perlu diarahkan pada keterpaduan mutu pembelajaran, kompetensi kejuruan, karakter dan etika kerja, serta relevansi lulusan. Dalam konteks pendidikan berbasis pesantren, nilai amanah, disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran dapat menjadi modal penguatan budaya mutu sekaligus mendukung pembentukan lulusan yang kompeten dan berkarakter.

Budaya mutu membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengubah kebijakan mutu menjadi kebiasaan organisasi. Kepala sekolah berperan memberikan arah, membangun kerja sama, dan memastikan hasil evaluasi ditindaklanjuti. Prinsip TQM menekankan bahwa mutu merupakan tanggung jawab seluruh anggota organisasi melalui *customer focus*, keterlibatan bersama, *continuous improvement*, dan pengambilan keputusan berbasis data (Brillianov & Suklani, 2024). Dengan demikian, mutu di SMK Al-Munawwir tidak seharusnya menjadi tanggung jawab tim akreditasi saja. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, yayasan, orang tua, dan mitra dunia kerja perlu memiliki peran sesuai bidang masing-masing. Keterlibatan kolektif tersebut menjadikan akreditasi sebagai bagian dari sistem mutu, bukan kegiatan administratif yang hanya aktif menjelang visitasi.

Pengambilan Keputusan Berbasis Data dan Dokumentasi sebagai Bukti Praktik Mutu

Penguatan budaya mutu membutuhkan keputusan yang didasarkan pada data, bukan semata-mata asumsi. Hasnadi (2021) menempatkan pendekatan ilmiah sebagai salah satu prinsip TQM, sedangkan Brillianov dan Suklani (2024) menekankan pentingnya *data-driven decision making*. Data sekolah dapat mencakup hasil belajar, kehadiran, kedisiplinan, kompetensi praktik, kondisi sarana-prasarana, perkembangan lulusan, dan masukan dunia kerja. Data tersebut perlu diolah melalui siklus data → analisis → masalah → solusi → evaluasi → perbaikan. Dengan pendekatan ini, dokumen akreditasi tidak hanya menjadi arsip administratif, tetapi menjadi bukti perjalanan sekolah dalam mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Dokumentasi penting dalam akreditasi, tetapi tidak boleh menggantikan praktik nyata. Dokumen seharusnya menjadi bukti bahwa program telah direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti. Kajian Nurryna et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi SPMI pada SMK membutuhkan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Oleh karena itu, dokumentasi mutu dapat disederhanakan melalui pola Program → Pelaksanaan → Bukti → Evaluasi → Tindak Lanjut. Pola ini membuat dokumen lebih fungsional karena tidak hanya digunakan untuk akreditasi, tetapi juga menjadi dasar refleksi dan perbaikan sekolah. Dengan demikian, prinsip yang perlu dibangun adalah dokumen menjadi bukti dari mutu, bukan pengganti mutu.

Continuous Improvement sebagai Jantung Budaya Mutu

Continuous improvement merupakan inti TQM karena mutu tidak dipandang sebagai kondisi yang selesai setelah standar tercapai, tetapi sebagai proses yang terus dikembangkan. Suaeb (2022) menunjukkan bahwa penerapan *continuous improvement* pada SMK dapat diarahkan pada aspek

organisasi, administrasi, sumber daya, dan pembelajaran. Prinsip ini menunjukkan bahwa perbaikan mutu perlu menjadi bagian dari aktivitas sekolah secara menyeluruh. Dalam konteks SMK Al-Munawwir, siklus mutu dapat dikembangkan melalui tahapan evaluasi → identifikasi masalah → perencanaan → pelaksanaan → evaluasi → tindak lanjut. Siklus tersebut perlu berlangsung sepanjang tahun sehingga akreditasi menjadi bagian dari proses perbaikan, bukan alasan utama sekolah melakukan pembenahan.

Nilai Kepesantrenan sebagai Modal Budaya Mutu dan Refleksi Kritis

Lingkungan kepesantrenan memberikan peluang bagi SMK Al-Munawwir untuk mengembangkan budaya mutu yang mengintegrasikan kompetensi vokasional dengan karakter. Nilai amanah dapat diwujudkan melalui integritas, disiplin melalui budaya kerja, tanggung jawab melalui profesionalitas, dan kejujuran melalui etika kerja. Hair dan Sofwan (2022) menunjukkan bahwa prinsip TQM seperti kepemimpinan, keterlibatan anggota, pendekatan proses, pengambilan keputusan berbasis fakta, dan perbaikan berkelanjutan relevan diterapkan dalam pendidikan pesantren. Dengan demikian, nilai kepesantrenan tidak perlu ditempatkan sebagai unsur yang terpisah dari pendidikan vokasional, tetapi dapat menjadi modal budaya untuk membentuk lulusan yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki etos kerja dan tanggung jawab profesional.

Berdasarkan kajian dokumen dan literatur, persoalan utama yang perlu dihindari adalah menjadikan akreditasi sebagai kegiatan administratif yang bersifat temporer. Pola “menjelang akreditasi → mengumpulkan dokumen → visitasi → selesai” perlu diubah menjadi “merencanakan → melaksanakan → mendokumentasikan → mengevaluasi → memperbaiki → mengulang”. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran dari budaya kepatuhan menuju budaya perbaikan. Akreditasi seharusnya berfungsi sebagai cermin, bukan panggung. Sebagai cermin, akreditasi membantu sekolah melihat kondisi mutu secara objektif dan menentukan perbaikan berikutnya. Sebagai panggung, akreditasi hanya mendorong sekolah menampilkan kondisi terbaik

ketika evaluasi berlangsung. Karena itu, nilai akreditasi akan lebih bermakna apabila menjadi refleksi dari mutu yang telah dibangun secara konsisten.

Rekomendasi Penguatan Budaya Mutu di SMK Al-Munawwir

Berdasarkan pembahasan tersebut, penguatan budaya mutu dapat diarahkan pada beberapa langkah utama. Pertama, membangun siklus mutu tahunan agar evaluasi dan perbaikan berlangsung secara konsisten. Kedua, melakukan evaluasi diri secara berkala untuk menentukan kekuatan, kelemahan, dan prioritas pengembangan. Ketiga, mengembangkan indikator mutu khas sekolah yang mengintegrasikan kompetensi vokasional, karakter kepesantrenan, kedisiplinan, etika kerja, dan kesiapan kerja. Keempat, menerapkan dokumentasi berbasis bukti melalui hubungan antara program, pelaksanaan, hasil, evaluasi, dan tindak lanjut. Kelima, memperkuat teamwork agar tanggung jawab mutu tidak hanya berada pada tim akreditasi. Keenam, menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga program perbaikan lebih objektif. Ketujuh, menempatkan predikat akreditasi B sebagai baseline, bukan tujuan akhir, sehingga hasil akreditasi dapat digunakan untuk menentukan target peningkatan mutu pada periode berikutnya.

KESIMPULAN

Penguatan budaya mutu di SMK Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta perlu ditempatkan sebagai proses pengembangan organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan, bukan sebagai persiapan administratif menghadapi akreditasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa mutu pendidikan kejuruan perlu dibangun melalui keterpaduan antara kualitas pembelajaran, kompetensi vokasional, karakter, relevansi lulusan, kepemimpinan, keterlibatan warga sekolah, dan penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Lingkungan kepesantrenan memberikan modal nilai yang dapat memperkuat orientasi tersebut, terutama dalam membangun integritas, disiplin, tanggung jawab, dan etika kerja. Dalam kerangka ini, akreditasi memiliki fungsi strategis sebagai instrumen evaluasi yang membantu sekolah mengenali posisi mutunya dan menentukan arah pengembangan berikutnya.

Penguatan budaya mutu selanjutnya membutuhkan konsistensi antara sistem penjaminan mutu, praktik pendidikan, dokumentasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Sekolah perlu menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar penetapan prioritas sehingga perbaikan tidak berhenti pada pemenuhan indikator akreditasi, tetapi menghasilkan perubahan yang dapat dipertahankan dalam tata kelola dan proses pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan budaya mutu tidak semata-mata ditentukan oleh pencapaian predikat akreditasi, tetapi oleh kemampuan sekolah membangun sistem yang memungkinkan seluruh warga sekolah belajar dari hasil evaluasi, merespons perubahan, dan meningkatkan kualitas secara konsisten. Kesimpulan ini sekaligus menegaskan bahwa akreditasi akan memiliki nilai yang lebih substantif ketika menjadi bagian dari mekanisme pembelajaran dan pengembangan organisasi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, M., & Wiyani, N. A. (2024). Implementation of character education based on Total Quality Management: Strengthening the Profile of Pancasila students in kindergarten. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 18(1), 195–207. <https://doi.org/10.21009/IPUD.181.14>.
- Ardiansyah, M. (2024). Penerapan konsep Total Quality Management (TQM) dalam meningkatkan mutu pendidikan SD Islam Perti Jakarta Barat. *Research and Development Journal of Education*, 10(1).
- Asy'ari, H., Munawwaroh, Z., & Azmi, U. (2021). Analisis pelaksanaan akreditasi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Pembangunan UIN Jakarta. *Idarah: Jurnal Pendidikan dan Kependidikan*, 5(2), 143–162. <https://doi.org/10.47766/idarrah.v5i2.124>
- Asy'ari, H., Munawwaroh, Z., & Azmi, U. (2021). Analisis pelaksanaan akreditasi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Pembangunan UIN Jakarta. *Idarah: Jurnal Pendidikan dan Kependidikan*, 5(2). <https://doi.org/10.47766/idarrah.v5i2.124>.
- Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. (2025). *Panduan akreditasi untuk sekolah/madrasah*. BAN-PDM.
- Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. (2025). *Panduan penjelasan instrumen akreditasi 2024 versi 2025 untuk SMK/MAK*.
- BAN-PDM. (2025). *Panduan akreditasi untuk sekolah/madrasah*. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

- Brilliantov, V. S. G., & Suklani. (2024). The principles of Total Quality Management in building a quality-based educational institution. *El-Idare: Journal of Islamic Education Management*, 10(2), 35–42. <https://doi.org/10.19109/elidare.v10i2.21172>
- Brilliantov, V. S. G., & Suklani. (2024). The principles of Total Quality Management in building a quality-based educational institution. *El-Idare: Journal of Islamic Education Management*, 10(2). <https://doi.org/10.19109/elidare.v10i2.21172>.
- Hair, M. A., & Sofwan, A. (2022). Total Quality Management sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Ziyadatut Taqwa. *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 8(2), 167–176.
- Hair, M. A., & Sofwan, A. (2022). Total Quality Management sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Ziyadatut Taqwa. *Ahsana Media*, 8(2), 167–176.
- Hasnadi, H. (2021). Total Quality Management: Konsep peningkatan mutu pendidikan. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 6(2), 143–150. <https://doi.org/10.30998/sap.v6i2.9331>
- Hasnadi. (2021). Total Quality Management: Konsep peningkatan mutu pendidikan. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 6(2), 143–150. <https://doi.org/10.30998/sap.v6i2.9331>.
- Hastuti, E. (2022). Total Quality Management dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Cahaya Hati Kota Bekasi. *Tadris: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 12–28.
- Huda, M., & Aimah, S. (2024). Evaluasi dan akreditasi sekolah sebagai indikator mutu pendidikan: Studi kasus di MA Tahfidz Al-Quran Al-Islami. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.7230>.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan*.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan*.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). *SMK Al-Munawwir Krapyak: Detail profil sekolah*. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). *Standar Nasional Pendidikan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah*. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.
- Kurniawan, G. D., Marini, Akbari, M., Fakhri, E., Aslamiah, & Cinantya, C. (2026). Building a school quality culture through the implementation of TQM (Total Quality Management). *Journal of Educational Sciences*, 10(2), 2696–2704. <https://doi.org/10.31258/jes.10.2.p.2696-2704>.
- Lasiana, N., & Hidayatulloh, H. (2022). Implementation of Total Quality Management (TQM) and Six Sigma in the learning process in vocational high schools. *Indonesian Journal of Education Methods Development*, 17(3), 1–10. <https://doi.org/10.21070/ijemd.v19i.652>

- Lasiana, N., & Hidayatulloh. (2022). Implementation of Total Quality Management (TQM) and Six Sigma in the learning process in vocational high schools. *Indonesian Journal of Education Methods Development*. <https://doi.org/10.21070/ijemd.v19i.652>.
- Nurryna, A. F., Widiastuti, I., & Saputro, H. (2024). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Sekolah Menengah Kejuruan: *Systematic literature review. Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 7(3). <https://doi.org/10.20961/shes.v7i3.94118>
- Nurryna, A. F., Widiastuti, I., & Saputro, H. (2024). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Sekolah Menengah Kejuruan: Systematic Literature Review. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 7(3). <https://doi.org/10.20961/shes.v7i3.94118>.
- Rahmadani, L. S., & Soddiq, M. J. (2023). Implementasi Total Quality Management untuk meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Darussholihin Sumberadi Mlati Sleman. *Indonesian Journal of Educational Management and Leadership*, 1(1), 57–70. <https://doi.org/10.51214/ijemal.v1i1.500>.
- Sahdat, S., Rizhan, M., Sulistiawan, E., Aslamiah, & Cinantya, C. (2026). Quality culture, quality work culture, and educational quality: A systematic literature review. *Curricula: Journal of Curriculum Development*.
- Sahdat, S., Rizhan, M., Sulistiawan, E., Aslamiah, A., & Cinantya, C. (2025). Quality culture, quality work culture, and educational quality: A systematic literature review. *Curricula: Journal of Curriculum Development*, 4(2). <https://doi.org/10.17509/curricula.v4i2.92487>
- Saputri, E. N., Muti'ah, S., Fadel, M., Hasri, S., & Sohiron. (2024). Peran Total Quality Management (TQM) dalam pendidikan: Analisis buku Edward Sallis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 29544–29552. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.17650>.
- Suaeb, S. (2022). Penerapan prinsip *continuous improvement* dalam Total Quality Management untuk meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 5(1), 12–27. <https://doi.org/10.33627/pk.v5i1.686>
- Suaeb. (2022). Penerapan prinsip continuous improvement dalam Total Quality Management untuk meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 5(1), 12–27. <https://doi.org/10.33627/pk.v5i1.686>.
- Suandi, A. (2023). Enhancing character education through Total Quality Management: An empirical study in the Faculty of Education. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.14421/manageria.2023.81-04>.
- Wardana, H., Saihu, M., & Shunhaji, A. (2023). Peningkatan mutu pembelajaran melalui Total Quality Management di SMA Darul Muqorrobin Kota Tangerang. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(8), 821–833. <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i8.2169>.
- Yasin, I. (2021). Problem kultural peningkatan mutu pendidikan di Indonesia: Perspektif Total Quality Management. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 2(3), 239–246. <https://doi.org/10.54371/ainj.v2i3.87>